

**PERSEPSI PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN TRANSPARANSI,
AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DENGAN
PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN *GOOD
GOVERNANCE* PADA PEMERINTAHAN DESA**

SKRIPSI



MERI ERANIA ELKOSI

12180365

FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meri Erania Elkosi
NIM : 12180365
Program studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PERSEPSI PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN TRANSPARANSI,
AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DENGAN
PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD
GOVERNANCE PADA PEMERINTAHAN DESA”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 17 September 2022

Yang menyatakan



(Meri Erania Elkosi)
NIM.12180365

HALAMAN PENGAJUAN

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Bisnis Program Studi Akuntansi

Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Akuntansi

Disusun Oleh:

MERI ERANIA ELKOSI

12180365

FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**“PERSEPSI PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS,
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DENGAN PENGELOLAAN DANA DESA
DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* PADA PEMERINTAHAN DESA”**

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

MERI ERANIA ELKOSI

12180365

dalam Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan **DITERIMA** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Akuntansi pada tanggal 29 Juli 2022

Nama Dosen

Tanda Tangan

1. Astuti Yuli Setyani, SE., M.Si., Ak. CA
(Ketua Tim Penguji)



2. Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih, M.Si
(Dosen Penguji)



3. Eka Adhi Wibowo, SE, M.Sc
(Dosen Pembimbing)



Yogyakarta, 12 Agustus 2022

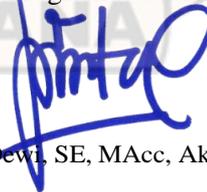
Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Perminas Pangeran, SE., M. Si.



Christine Novita Dewi, SE, MAcc, Ak, CA, CMA., CPA.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi dengan judul:

“Persepsi Publik Terhadap Hubungan Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dengan Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintahan Desa”.

Yang saya kerjakan bertujuan melengkapi sebagian syarat untuk menjadi sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta adalah bukan hasil tiruan atau duplikasi hasil karya yang sumber informasinya telah dicantumkan sebagaimana mestinya.

Jika kemudian hari didapat bahwa hasil skripsi ini adalah hasil plagiasi atau tiruan dari karya pihak lain maka saya bersedia menerima sanksi yaitu pencabutan gelar saya.

Yogyakarta, 15 Juli 2022



Meri Erania Elkosi

NIM: 12180365

HALAMAN MOTO

“Ujilah segala sesuatu dan Peganglah yang Baik”

(1 Tesalonika 5:21)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan hati yang gembira dan penuh syukur selama menjalani proses penyusunan dan penelitian skripsi ini, peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang terkhusus kepada semua pihak yang membantu serta memberikan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan hati bersyukur, penulis persembahkan karya ini kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan berkat berupa hikmat dan akal budi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Yoelson Kesyah dan Ibu selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan materi, nasehat dan doa.
3. Eka Adhi Wibowo S.E., M.Sc., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, dukungan serta waktu luang ditengah kesibukannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Karensius Victor S.H, selaku kakak yang sangat penulis kasihi, terimakasih telah memberikan dukungan, perhatian, doa yang terbaik.
5. Teman-teman dari semester satu sampai sekarang yang sudah memberikan dukungan berpartisipasi baik secara materi maupun tenaga dan waktu yang diberikan Elvauli, Novyanti, Mega Yosepa, Aloina, Donna S, dan Wellant yang sudah ikut serta membantu.
6. Teman-teman dan sahabat terbaik selama mengerjakan skripsi (Novita Ayu, Ardelia, Renza, Andrea dan Misiana) yang telah banyak

membantu, menemani dan memberikan masukan selama proses pengerjaan skripsi ini.

7. Hartapriliano Ady Nugroho selaku teman terbaik yang memberikan semangat, dukungan dalam bentuk apapun, serta memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Akuntansi Universitas Kristen Duta Wacana dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan doa bagi penulis sehingga dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik.

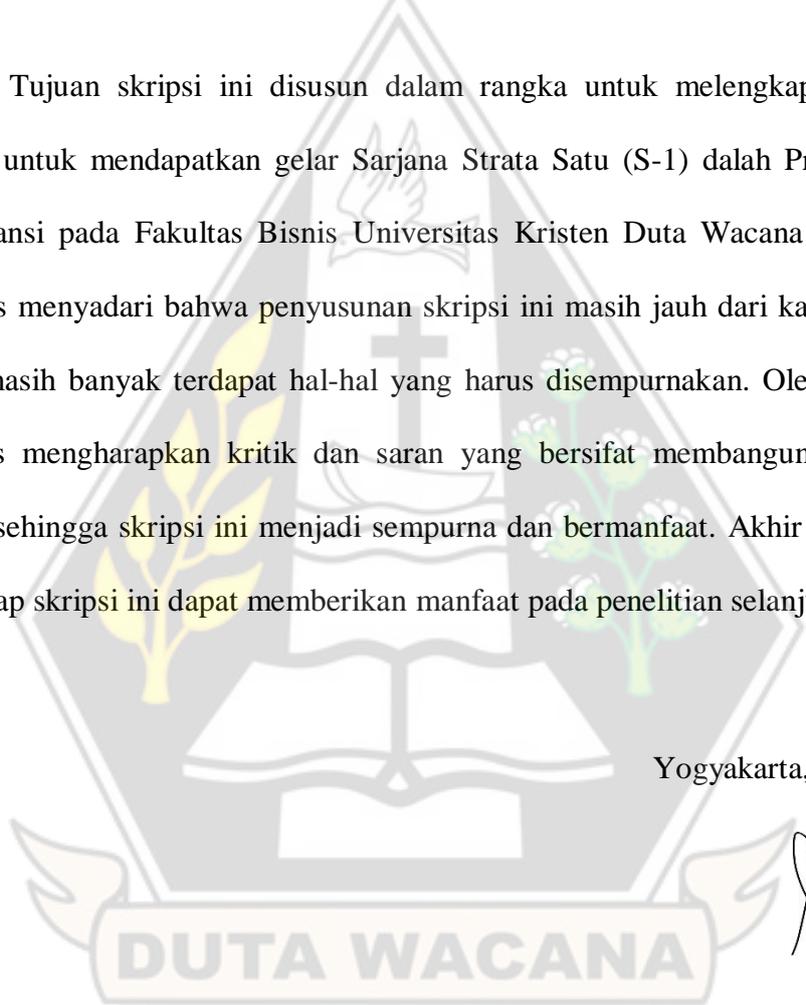


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena atas segala berkat yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Persepsi Publik Terhadap Hubungan Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dengan Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada Pemerintahan Desa”.

Tujuan skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan masih banyak terdapat hal-hal yang harus disempurnakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sehingga skripsi ini menjadi sempurna dan bermanfaat. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat pada penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 14 Juli 2022



Meri Erania Elkosi

(Meri Erania Elkosi)

NIM: 12180365

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Batasan Penelitian	11
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)	12
2.1.2 Transparansi	13
2.1.3 Akuntabilitas	15
2.1.4 Partisipasi Masyarakat	17
2.1.5 Pengelolaan Dana Desa	18
2.1.6 Good Governance	19
2.2 Penelitian Terdahulu	22

2.3	Pengembangan Hipotesis	25
2.4	Kerangka Pemikiran	27
BAB III		28
METODE PENELITIAN		28
3.1	Data dan Sumber	28
3.2	Definisi Aspek dan Pengukurannya	28
3.3	Populasi dan Sampel	32
3.3.1	Populasi	32
3.3.2	Sampel	32
3.4	Desain Penelitian	32
3.5	Metode analisis data	33
3.5.1	Uji Validitas	33
3.5.2	Uji Reliabilitas	34
3.6	Metode Pengumpulan Data	34
3.7	Pengujian Hipotesis	35
3.7.1	Uji Korelasi Kendall's	35
3.7.2	Uji Korelasi Rank Spearman	35
BAB IV		36
ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN		36
4.1	Sampel Penelitian	36
4.1.1	Deskriptif Data Penelitian	36
4.1.2	Karakteristik Responden	36
4.2	Uji Hipotesis	40
4.3	Validitas dan Uji Realibitas	42
4.4	Pembahasan dan Hasil	47
BAB V		51
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN		51
5.1	Kesimpulan	51
5.2	Keterbatasan	51
5.3	Saran	51
DAFTAR PUSTAKA		53
LAMPIRAN		55

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 2 Variabel, Definisi, Indikator, dan Skala Pengukuran Aspek Penelitian.....	28
Tabel 3 Jenis Kelamin Responden	37
Tabel 4 Jabatan Responden	38
Tabel 5 Lama Jabatan Responden	38
Tabel 6 Pendidikan Terakhir Responden	39
Tabel 7 Hasil Pengujian Validitas Variabel Transparansi.....	43
Tabel 8 Hasil Pengujian Validitas Variabel Akuntabilitas.....	43
Tabel 9 Hasil Pengujian Validitas Partisipasi Masyarakat.....	44
Tabel 10 Hasil Pengujian Validitas Pengelolaan Dana Desa	45
Tabel 11 Relibility Statistics Transparansi (X1)	46
Tabel 12 Relibility Statistics Transparansi (X1)	46
Tabel 13 Relibility Statistics Partisipasi Masyarakat (X3).....	46
Tabel 14 Relibility Statistics Pengelolaan Dana Desa (Y).....	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Korupsi Dana Desa	6
Gambar 2 Kerangka Pemikiran	27



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	55
Lampiran 2 Hasil Uji Validitas, Reliabilitas, Korelasi Kendall's, Korelasi Rank-Spearman	62
Lampiran 3 Kartu Konsul	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 4 Tabulasi Data	90
Lampiran 5 Hasil Jawaban Variabel Transparansi	72
Lampiran 6 Hasil Jawaban Variabel Akuntabilitas	74
Lampiran 7 Hasil Jawaban Variabel Partisipasi Masyarakat	77
Lampiran 8 Hasil Jawaban Variabel Pengelolaan Dana Desa.....	80
Lampiran 9 Hasil Jawaban Variabel Good Governance	83



**PERSEPSI PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN TRANSPARANSI,
AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DENGAN
PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN *GOOD
GOVERNANCE* PADA PEMERINTAHAN DESA**

Meri Erania Elkosi

12180365

Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

Email: meri.elkosi@students.ukdw.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada hubungan Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dengan Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan *Good Governance*. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif, dengan teknik purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat publik dengan jumlah responden yang mengembalikan kuesioner adalah 111 responden yaitu 4 orang perangkat desa dengan 117 responden lainnya. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling, yaitu pengambilan sampel dari hasil kuesioner. Pengujian yang digunakan yaitu, uji validitas, uji reliabilitas, uji hipotesis, uji korelasi kendall's, dan uji rank Spearman. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terdapat hubungan dengan pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *good governance*.

Kata Kunci: Pengelolaan dana desa, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, *Good Governance*

**COMMUNITY PERCEPTIONS ON TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY,
AND COMMUNITY PARTICIPATION WITH VILLAGE FUND
MANAGEMENT IN REALIZING GOOD GOVERNANCE**

Meri Erania Elkosi

12180365

Accounting Studies Program Faculty Business

Duta Wacana Christian University

Email: meri.elkosi@students.ukdw.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine whether there is a relationship between Transparency, Accountability, and Community Participation with Village Fund Management to realize Good Governance. This research uses descriptive qualitative method, with purposive sampling technique. The population in this study is the public with the number of respondents who returned the questionnaire as many as 111 respondents, namely 4 village officials with 117 other respondents. Sampling in this study used a sampling technique, namely sampling from the results of a questionnaire. The tests used are validity test, reliability test, hypothesis test, Kendall correlation test, and spearman rank test. This study uses quantitative methods with primary data. Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that transparency, accountability, and community participation are related to the management of village funds to realize good governance.

Keyword: Village Fund Managent, Accountability, Transparency, Community Participation, Good Governan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pemerintahan di Indonesia semakin cepat dengan diterapkannya era reformasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Hal ini dibarengi dengan perkembangan yang pesat membuat kota semakin ramai, sehingga peran desa adalah pemerintah. Menurut UU Desa No. 6 Tahun 2014, desa berhak membuat peraturan dan memegang kewenangan sesuai dengan yang diperlukan desa. Artinya, berbanding melalui keperluan serta prioritas dana desa, anggaran dipakai buat membiayai semua kewenangan desa. Anggaran modal tingkat desa yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa, dan dikeluarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Boudiati dkk. (2019: 426) menunjukkan bahwa desa telah menerima hibah pembangunan yang cukup tinggi dari dana desa. Sebagai bentuk pengakuan nasional pada desa, terkhusus saat agenda menjelaskan kegunaan khusus desa seta memperkuat status desa dan kota sebagai badan utama pembangunan, maka perlu mengatur dan mengatur desa melalui undang-undang. Dalam rangka mendukung sepenuhnya pengelolaan desa dan pelaksanaan tugas dan fungsi pembangunan desa, undang-undang memberikan kewenangan dan kewenangan kepada desa untuk mengelola dana mikro, dengan harapan dapat mempercepat pembangunan berbasis

potensi lokal (Atiq, 2018). Dana yang lebih besar ini perlu dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik untuk mencegah aparat pemerintah menyimpang dari pengelolaan dana tingkat desa.

Kebijakan tersebut mengintegrasikan dan sekaligus mengoptimalkan seluruh alokasi anggaran yang ada dari pemerintah hingga desa. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dan Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan mengatur tentang kewajiban penganggaran, alokasi, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa. Dana desa dibatasi sebesar Rp 72 triliun pada tahun 2021 dialokasikan buat 74.961 desa, dan pada tanggal 10/01/22, 74.939 desa mencapai 71,85 triliun rupiah. Batas pendanaan didefinisikan sebagai batas pengeluaran maksimum yang tidak boleh dilampaui, dan pelaksanaannya harus transparan. Ada dua jenis cap dana desa: reguler dan mandiri. Kategori ini didasarkan pada hasil penilaian tahunan yang disiapkan oleh Departemen Pembangunan dan Migrasi Daerah Tertinggal Perdesaan.

Dana Desa tahun 2022 dibatasi sebesar Rp 68 triliun, dialokasikan untuk 74.961 desa di 434 kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah ini lebih kecil 4 triliun rupiah dari cap dana desa tahun lalu. Proyek pembangunan yang didanai Dana Desa ini menegaskan komitmen Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggiran, perbatasan, dan desa. Jadi tidak hanya membangun jalan tol, bandara atau pelabuhan, tetapi juga membangun infrastruktur kecil yang sangat dibutuhkan masyarakat pedesaan. Di tengah pandemi Covid-19, Dana Desa juga digunakan untuk mendanai jaring pengaman sosial dalam bentuk pembayaran tunai langsung. (BLT) untuk warga yang terkena dampak.

Pengelolaan Dana Desa berpedoman pada pedoman Pasal 4 ayat 7 Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Prinsip good governance dalam mengelola dana desa yang baik membutuhkan tiga poin penting akuntabilitas, transparansi dan keterlibatan masyarakat (Mahmudi, 2015:9). Dalam mengelola keuangan desa juga perlu dipahami tanggung jawab, transparansi, dan partisipasi masyarakat dari para pemimpin desa untuk mendukung pembangunan desa dan mencapai kesejahteraan desa.

Akuntabilitas berasal dari kata bahasa Inggris “accountability” yang berarti tanggung jawab atau keadaan yang perlu dipertanggungjawabkan. Menurut Setiana dan Yuliani (2017:206), akuntabilitas adalah kegiatan dimana wali/agen/kepala desa dan instansinya bertanggung jawab atas pelaporan, pelaporan, dan pengungkapan kegiatan, dan wali amanat memiliki kekuasaan dan tanggung jawab untuk melaporkan dan bertanggung jawab. Tanggung jawab pengelolaan adalah tanggung jawab pemerintah desa untuk mengikuti tata cara, Strategi, sesuai hukum yang berlaku, serta melalui pedoman penanganan keuangan tingkat desa (Supadmi dan Suputra, 2018). Dalam hal akuntabilitas, di mana ada pelaporan, ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah tentang membangun pemerintahan yang akuntabel.

Ketika menerapkan akuntabilitas dalam otoritas publik, prinsip-prinsip akuntabilitas berikut dapat diamati: (1) manajemen lembaga dan semua karyawan harus berkomitmen untuk menjalankan bisnis digunakan untuk bertanggung jawab, (2) harus memiliki sistem untuk memastikan bahwa sumber daya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, (3) harus memiliki sasaran dan berikut bukti yang ditetapkan, (4) wajib memiliki kemampuan untuk mencapai visi dan misinya, dan manfaat serta keberhasilan yang dicapai, (5) wajib terang-terangan serta sasaran yang tepat, terbuka

serta terukur beserta metodologi serta teknologi terkini untuk kemampuan dan akuntabilitas untuk mengubah tata kelola kelembagaan menjadi katalisator pemerintah untuk inovasi (LAN dan BPKP, 2000).

Pernyataan Akuntabel Dana Desa ICW membahas korupsi anggaran dana desa akibat pengelolaan anggaran tanpa disertai transparansi akuntabilitas, partisipasi dan akuntabilitas terkait kepemimpinan, pembangunan dan keuangan desa (ICW, 2018). Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan good governance adalah partisipasi dalam pelaksanaan *good governance* itu sendiri, misalnya berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pemerintah kota juga perlu berperan serta sistem kelola keuangan dana desa dan mengoptimalkan tempat dana desa. Temuan dari penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan pedesaan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Fokus lain penggunaan anggaran pembangunan desa adalah transparansi, yang menjamin ketersediaan dan keakuratan informasi, menunjukkan bahwa proses pembukaan berjalan dengan baik dan kepercayaan masyarakat meningkat. Transparansi juga harus berarti memberikan keterbukaan, sederhana juga sama bagi pemangku kepentingan, dan disampaikan dengan cara yang tepat dan dapat dipahami. Menurut Setiana dan Yuliani (2017:2016), keterbukaan merupakan penyediaan kabar dana yang transparan serta terbuka di khalayak umum dengan dasar penghormatan terhadap pengungkapan dan pengakuan penuh atas hak pemerintah untuk mendelegasikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya. Ketahui hukum dan pedoman untuk itu dan kepatuhannya. Sebagai salah satu lembaga pengawas,

pemerintah desa memberikan data dan informasi kepada masyarakat berdasarkan fakta yang ada, dan memegang peranan penting dalam keberlangsungan sistem.

Menurut Wisnawati dkk. (2018), pengelolaan dana di tingkat desa harus didasarkan pada prinsip transparansi, keterbukaan, keaktifan masyarakat, dan akuntabilitas administrasi, awal dari keseluruhan, serta pemeliharaan. Penempatan tingkat desa adalah anggaran rumah tangga yang disediakan oleh pemerintah untuk tingkat desa, yang diterima dari kabupaten dengan pembagian pajak daerah dan pemerataan keuangan pusat dan daerah. Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 mengatur bahwa rumus pembagian dihitung menurut jumlah desa dengan bobot 90%, dan hanya 10% yang dihitung menurut rumus jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis.

Proses penyaluran dana desa (data Omspan) Per 16 Oktober 2020, dana desa yang dialokasikan RKD mencapai 29,04 triliun rupiah pada tahap pertama, 27,17 triliun rupiah pada tahap kedua, dan 27,17 triliun rupiah pada tahap ketiga pada 2019. . 2.922 triliun rupiah. Tahap pertama Rp 13,93 triliun, tahap kedua Rp 26,75 triliun, dan tahap ketiga Rp 2,24 triliun. Pada tahun 2019, jumlah Desa Kanal meningkat dari level 1 menjadi 74.549, level 2 menjadi 71.008, level 3 menjadi 6.023, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 74.888 untuk level 1, 74.109 untuk level 2, dan 74.109 untuk level 3. 15572. dari 42.919 pada 2019, naik menjadi 59.123 pada 16 Oktober 2020. Dana desa telah dialokasikan sejak 2015 dengan total anggaran Rp 20,76 triliun. Total penyaluran dana desa pertahun meningkat serta sekarang diperkirakan menyentuh 1 miliar per desa. Dana desa harus dikelola secara mandiri oleh kepala desa dan kader desa. Alfiansyah (2020) menemukan bahwa penerapan

sistem pajak desa dan sistem pengendalian intern pemerintah akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengelolaan dana desa yang baik sangat penting untuk keberlanjutan dan pembangunan desa karena telah banyak penelitian sebelumnya tentang tata kelola keuangan desa yaitu akuntabel, transparan serta kurangnya keikutsertaan masyarakat. Dana Desa erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Fenomena pengelolaan dana desa menjadi topik yang menarik untuk dibahas secara mendalam. Menurut artikel dan berbagai sumber, masih banyak data keuangan yang tidak sesuai, dan juga banyak penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, seperti dilansir Selasa, 10 Mei, 2022. Mantan kepala desa dan putranya terdaftar sebagai tersangka dalam korupsi dana desa 700 juta dong, sementara IK tetap menjadi kepala desa Ban Gaul untuk keuntungan pribadi.

Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), Pengelolaan Dana Desa akan menjadi kasus korupsi pada tahun 2021. ICW telah merilis laporan tren penuntutan korupsi pada tahun 2021. Laporan tersebut juga menyebutkan 10 industri dengan kasus korupsi terbanyak pada tahun 2021, dan dari 10 industri yang disebutkan sebelumnya, pengelolaan dana desa menduduki urutan teratas dengan 154 kasus. Aparat penegak hukum menangani sebagian besar perkara korupsi di bidang ini pada tahun 2021, peneliti ICW Lalola Ester, 18 April 2021. ICW melaporkan perkara korupsi dana desa berikut dari tahun 2015 s/d 2021.

Gambar 1 Korupsi Dana Desa



Korupsi Dana Desa



Sumber: Pemetaan kasus korupsi berdasarkan sektor. Foto: Dok.ICW

Pada Gambar 1.1, ICW mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan (Kemendes PDTT), untuk mengambil langkah konkrit untuk mencegah korupsi yang lebih strategis. Pengelolaan dana di tingkat desa merupakan topik menarik yang layak untuk dikaji secara mendalam. Terlihat masih banyak masyarakat di desa yang belum mengetahui bagaimana merencanakan dan mengelola dana desa di desa. Sehingga, peneliti tertarik pada isu dan konteks berbeda yang dihadapi desa jalanan dan melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Publik terhadap hubungan transparansi, akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dengan Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan *Good Governance* pada Pemerintahan Desa. Tata Kelolanya di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam konteks ini, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan antara transparansi dengan pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good governance?
2. Apakah ada hubungan antara akuntabilitas dan pengelolaan dana di tingkat desa dalam mewujudkan good governance?
3. Apakah ada hubungan antara partisipasi masyarakat dengan pengelolaan dana desa saat mewujudkan good governance?



1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pertanyaan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji hubungan antara transparansi dan pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan *good governance*?
2. Investigasi hubungan akuntabilitas dan pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan *good governance*?
3. Menguji hubungan antara partisipasi dan pengelolaan dana desa dalam penerapan tata kelola yang baik?

1.4 Manfaat Penelitian

Bergantung pada tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini secara teoritis memberikan kontribusi untuk memahami dan menganalisis kaitan dari ketiganya dalam mengelola dana desa untuk *good governance*. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian lain yang mengeksplorasi hal yang sama.
2. Manfaat praktis

Penelitian ini sebenarnya dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Universitas Kristen Duta Wacana

Dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran dan bahan perbandingan, serta sebagai tolak ukur bagi mahasiswa untuk menghasilkan bahan penelitian yang profesional dan ilmiah.

- b. Untuk peneliti

Kajian penelitian ini memberikan informasi dan referensi bagi pengembangan keilmuan pemerintah yang berfokus pada penggunaan anggaran dana desa.

c. Untuk pemerintahan desa

Membantu membentuk kebijakan pengelolaan dana desa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Melalui penelitian ini bermanfaat bagi yang belum memahami tentang penyaluran dana desa, dan juga memberikan masukan bagi kader desa untuk membantu menciptakan pemerintahan yang baik mulai dari awal, pekerjaan, partisipasi serta akuntabilitas penyaluran ADD dengan mengoptimalkan proses yang terkait dengan peningkatan anggaran pembangunan desa.

d. Untuk masyarakat

Studi ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang informasi Alokasi Dana Desa (ADD), dan studi ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa yang mungkin ingin diikuti oleh para pemimpin desa dan anggota masyarakat lainnya. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan tentang masyarakat. permasalahan yang tidak memahami alokasi dana di tingkat desa.

e. Untuk peneliti/mahasiswa

Dapat menjadi referensi pengembangan penelitian yang terkait penelitian, serta untuk memperluas pengetahuan tentang masalah-masalah terapan dan melatih mahasiswa untuk menggunakan data dari masyarakat secara ilmiah agar mereka dapat berpikir dan menyelesaikan masalah administrasi desa.

1.5 Batasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini menetapkan metode kuantitatif serta mengumpulkan data melalui kuesioner, Tahun studi yang digunakan adalah 2022.
- b. Aspek penelitian ini hanya membahas “persepsi masyarakat tentang hubungan antara transparansi, akuntabilitas, serta iku andilnya masyarakat dengan tata kelola dana desa guna terwujudnya pemerintaah yang baik oleh pemerintah desa.
- c. Lokasi penelitian ini tidak dibatasi, artinya tidak ada pembatasan masyarakat dalam mengisi kuesioner.



BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa data kuantitatif dihasilkan kesimpulan yaitu: data yang digunakan dalam penelitian ini dari hasil kuesioner kemudian dianalisa menggunakan uji korelasi. Dapat ditarik kesimpulan mengenai persepsi publik terhadap hubungan Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dengan Pengelolaan Dana Desa bahwa:

- 1) Hasil uji hipotesis menetapkan apabila variabel transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat yang di uji pada penelitian ini ada hubungan pada pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *good governance* pada desa.

5.2 Keterbatasan

Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut:

1. Pengisian kuesioner oleh responden tidak terlepas dari bias sosial respon
2. Penelitian hanya menggunakan metode kuantitatif

5.3 Saran

Dapat diberikan saran tentang bagaimana mengelola desa dan mewujudkan pemerintahan yang baik di desa, yaitu:

1. Untuk melaksanakan akuntabilitas, pemerintah desa harus menyediakan laporan pertanggungjawaban yang komprehensif, relevan, dan tepat waktu. Pemerintah perlu fokus pada akuntabilitas dengan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dan meningkatkan keterbukaan informasi pemerintah desa.

2. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai dana desa, penempatan SDM yang sesuai.
3. Lebih transparan dalam penggunaan dana desa.



DAFTAR PUSTAKA

Adriyanto Dr. (2021). Kebijakan Dana Desa Tahun 2021. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Indonesia.

Andriani, M. (2019). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (studi pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa). *E-Journal Akuntansi FEB Universitas Teknologi Sumbawa*, 1(2), 1-13.

Andriani, M. (2019). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (studi pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa). *E-Journal Akuntansi FEB Universitas Teknologi Sumbawa*, 1(2), 1-13.

Apriliana, R. (2017). Pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan good governance. *Surakarta: IAIN Surakarta*.

Arsik, S. F., & Lawelai, H. (2020). Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, dan Transparansi dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1-7.

Astuti, P., Widayanti, R., & Damayanti, R. (2021). Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance: Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 10(2), 164-180.

Astuty, E. (2013). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *Publika*, 1(2).

Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19-27.

Heriningsih, S., & Sudaryati, D. (2019). Pengaruh Good Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Desa dengan Religiusitas sebagai Pemoderasi. *Jurnal Optimum*, 9(1), 61-72.

Jaa Emilianus, (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Gurung Turi Kabupaten Manggarai Timur). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, Vol 7,1-9.

Lestari, C. N. M. (2018). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Prinsip–Prinsip Good Governance Pada Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang* (Doctoral Dissertation, Stie Pgrri Dewantara).

Mugni, M. (2017). *HUBUNGAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PENINGKATAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Arjawinangun)* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Semarang).

Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 132-158.

Rahajeng, M. M. (2021). Penerapan Prinsip–Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. *Public Policy And Management Inquiry*, 4(2), 163-174.

Rahman, M. A., Suwandi, M., & Hamid, A. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance.

RAMADHAN, F. A. (2020). *PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS DESA HAURPANGGUNG KECAMATAN TAROGONG KIDUL KABUPATEN GARUT)* (Doctoral Dissertation, Universitas Siliwangi).

Rosyan, A. N., Rahman, A. Z., & Kismartini, K. (2022). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TAMANAGUNG, KECAMATAN MUNTILAN, KABUPATEN MAGELANG. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(1), 37-48.

Sitomorang Rahel D, (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 26-41.

Taufiqi, D., & Ariani, K. R. (2022). The Effect of Good Governance, Accountability, and Transparency of Village Funds on Public Trust. *Procedia of Social Sciences and Humanities*, 3, 187-194.

Utomo, K. S., & Suharto, D. G. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 50-66.